

## Subsidi Silang Pendidikan: Solusi Ekonomi untuk Mengurangi Kesenjangan Sekolah Kota dan Desa

**Muh. Hasbi**

IAIN Sultan Amai Gorontalo  
[muh.hasbi@iaingorontalo.ac.id](mailto:muh.hasbi@iaingorontalo.ac.id)

### **Abstract**

*Educational inequality between urban and rural areas remains a major issue in the development of education in Indonesia. Differences in the quality of school infrastructure, access to technology, teacher competencies, and the economic capacity of communities have resulted in significant disparities in educational quality. Schools in urban areas generally possess more comprehensive educational facilities compared to those in rural regions. This condition has contributed to limited educational access for rural communities and high school dropout rates caused by economic constraints. This study aims to analyze educational cross-subsidization as an economic solution to reduce educational disparities between urban and rural schools in Indonesia. This study employs a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained from national and international scientific journals published between 2003 and 2024. The findings reveal that educational cross-subsidization represents a mechanism for redistributing educational resources from communities or regions with higher economic capacity to underprivileged communities. Cross-subsidy policies can be implemented through school operational assistance, educational scholarships, the development of rural school infrastructure, educational technology support, and the equitable distribution of qualified teachers. Educational cross-subsidization has proven effective in improving access to education, enhancing the quality of rural school facilities, reducing school dropout rates, and expanding learning opportunities for economically disadvantaged communities. However, the implementation of educational cross-subsidization still faces several challenges, including infrastructure disparities, limited budget supervision, digital inequality, and the low managerial capacity of local educational institutions. Therefore, inclusive, transparent, and sustainable educational policies are required to ensure that educational cross-subsidization can promote equitable national educational quality and support the balanced development of Indonesia's human resources.*

**Keywords:** *educational cross-subsidization, educational inequality, rural schools, economics of education, educational equity*

### **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan instrumen utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat mobilitas sosial dan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Namun demikian, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi persoalan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan

pedesaan. Ketimpangan tersebut terlihat dari kualitas fasilitas pendidikan, akses teknologi, distribusi tenaga pendidik, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Sekolah di wilayah perkotaan cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap seperti laboratorium, perpustakaan modern, dan akses internet stabil dibandingkan sekolah di pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan (Tilaar, 2006).

Data pendidikan nasional menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah masyarakat perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan. Selain itu, akses internet pendidikan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah kota dibandingkan desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akses pendidikan berkualitas masih lebih mudah diperoleh masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat desa (Sianipar et al., 2024). Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan. Selain itu, akses internet pendidikan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah kota dibandingkan desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akses pendidikan berkualitas masih lebih mudah diperoleh masyarakat perkotaan dibandingkan masyarakat desa (Sianipar et al., 2024). Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama kesenjangan pendidikan. Banyak keluarga di pedesaan mengalami keterbatasan ekonomi sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan akses teknologi. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan masyarakat desa (Sulfiani, 2024).

Selain itu, perkembangan pendidikan berbasis teknologi juga memperbesar kesenjangan pendidikan antara kota dan desa. Sekolah di perkotaan lebih mudah mengakses pembelajaran digital dibandingkan sekolah di wilayah terpencil yang masih mengalami keterbatasan internet dan perangkat teknologi (Maharani, 2024). Dalam perspektif ekonomi pendidikan, subsidi pendidikan merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Subsidi silang pendidikan menjadi konsep yang relevan karena memungkinkan redistribusi sumber daya pendidikan dari kelompok yang lebih mampu kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui bantuan operasional sekolah, beasiswa pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah desa, dan subsidi teknologi pendidikan. Penelitian mengenai subsidi silang pendidikan menjadi penting karena masih terbatasnya kajian yang membahas konsep tersebut sebagai solusi ekonomi dalam mengurangi kesenjangan sekolah dan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis subsidi silang pendidikan sebagai solusi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam konsep subsidi silang pendidikan dan relevansinya dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, dan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan subsidi pendidikan dan pemerataan pendidikan. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel akademik, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan pendidikan yang diterbitkan pada rentang tahun 2003–2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan dokumentasi berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Literatur dipilih berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan konsep ekonomi pendidikan dan kesenjangan pendidikan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis agar memudahkan proses interpretasi dan analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran subsidi silang pendidikan dalam mengurangi kesenjangan sekolah dan desa di Indonesia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini membahas tentang kesenjangan pendidikan antara kota dan desa, faktor ekonomi sebagai penyebab ketimpangan pendidikan, ketimpangan infrastruktur pendidikan, konsep subsidi silang pendidikan, implementasi subsidi pendidikan di Indonesia, dampak subsidi silang terhadap pemerataan pendidikan, dampak kesenjangan pendidikan terhadap pembangunan ekonomi, tantangan digitalisasi pendidikan desa, dan strategi penguatan subsidi silang pendidikan.

### **1. Kesenjangan Pendidikan antara Kota dan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan antara kota dan desa masih menjadi persoalan serius dalam sistem pendidikan Indonesia. Ketimpangan tersebut terlihat dari kualitas sarana dan prasarana sekolah, akses teknologi, kualitas tenaga pendidik, serta dukungan ekonomi masyarakat. Pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan sosial justru masih menunjukkan ketimpangan akses dan kualitas antarwilayah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat pedesaan memiliki

peluang yang lebih rendah dalam memperoleh pendidikan berkualitas dibandingkan masyarakat perkotaan. Dalam perspektif pembangunan pendidikan, ketimpangan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga memengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat secara jangka panjang (Tilaar, 2006).

Sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap seperti laboratorium, perpustakaan digital, jaringan internet, ruang multimedia, serta media pembelajaran berbasis teknologi. Sebaliknya, banyak sekolah di pedesaan masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, fasilitas laboratorium, perpustakaan, bahkan sarana sanitasi dasar. Maharani (2024) menjelaskan bahwa keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan menyebabkan kualitas proses pembelajaran menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut diperparah dengan ketimpangan pembangunan pendidikan yang masih lebih terpusat di wilayah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) (Riyadi & Ghuzini, 2022).

Selain infrastruktur fisik, ketimpangan pendidikan juga terlihat pada akses teknologi pendidikan. Perkembangan pendidikan digital menuntut sekolah memiliki akses internet dan perangkat teknologi yang memadai. Namun, banyak sekolah di wilayah pedesaan belum memiliki jaringan internet yang stabil dan fasilitas teknologi pembelajaran yang cukup. Penelitian Sianipar et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi pendidikan menyebabkan siswa di desa mengalami kesulitan mengikuti perkembangan pembelajaran berbasis digital. Pada masa pandemi COVID-19, kondisi tersebut semakin terlihat karena siswa di daerah pedesaan mengalami hambatan besar dalam mengikuti pembelajaran daring akibat keterbatasan perangkat digital dan akses internet (SMERU Research Institute, 2020).

Distribusi tenaga pendidik juga menjadi faktor penting yang memperbesar kesenjangan pendidikan antara kota dan desa. Guru berkualitas cenderung lebih banyak berada di wilayah perkotaan dibandingkan daerah terpencil. Banyak guru di daerah pedesaan menghadapi keterbatasan fasilitas pembelajaran, akses pelatihan profesional, dan dukungan teknologi pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas pembelajaran di sekolah desa relatif lebih rendah dibandingkan sekolah perkotaan (Riyadi & Ghuzini, 2022). Selain itu, rendahnya pemerataan distribusi guru menyebabkan beberapa sekolah di pedesaan mengalami kekurangan tenaga pendidik, terutama pada mata pelajaran tertentu seperti matematika, sains, dan teknologi informasi.

Kesenjangan pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat. Masyarakat perkotaan umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi sehingga mampu menyediakan

fasilitas pendidikan tambahan seperti kursus, bimbingan belajar, perangkat digital, dan akses internet bagi anak-anak mereka. Sebaliknya, masyarakat desa yang sebagian besar bekerja pada sektor informal dan pertanian tradisional memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Sulfiani (2024) menjelaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga memiliki hubungan erat dengan rendahnya partisipasi pendidikan dan tingginya angka putus sekolah di wilayah pedesaan. Ketimpangan ekonomi tersebut menyebabkan akses pendidikan berkualitas masih lebih mudah diperoleh kelompok masyarakat menengah ke atas dibandingkan masyarakat miskin.

Selain faktor ekonomi, kondisi geografis juga menjadi penyebab kesenjangan pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah di daerah terpencil berada pada wilayah dengan akses transportasi yang sulit sehingga menyulitkan distribusi fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik. Kondisi geografis tersebut menyebabkan pembangunan pendidikan di daerah pedesaan berjalan lebih lambat dibandingkan wilayah perkotaan (Aulia, 2024). Beberapa siswa di wilayah pedalaman bahkan harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai sekolah sehingga memengaruhi motivasi dan keberlanjutan pendidikan mereka. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, kesenjangan pendidikan menyebabkan kualitas sumber daya manusia antarwilayah menjadi tidak merata. Pendidikan yang berkualitas memiliki hubungan langsung dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hanushek dan Woessmann (2020) menjelaskan bahwa kualitas pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi karena pendidikan meningkatkan keterampilan, inovasi, dan daya saing tenaga kerja. Oleh karena itu, ketimpangan pendidikan antara kota dan desa dapat memperbesar kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat dalam jangka panjang.

Kesenjangan pendidikan juga berdampak terhadap rendahnya mobilitas sosial masyarakat desa. Pendidikan yang terbatas menyebabkan masyarakat pedesaan memiliki peluang kerja yang lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan. Akibatnya, masyarakat desa cenderung bekerja pada sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak stabil. Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi karena rendahnya pendidikan menyebabkan rendahnya peluang ekonomi masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara kota dan desa, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemerataan pembangunan pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat pembangunan infrastruktur sekolah di wilayah pedesaan, memperluas akses teknologi pendidikan, meningkatkan distribusi tenaga pendidik berkualitas, serta memperkuat program subsidi pendidikan bagi masyarakat miskin. Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta,

dan masyarakat juga penting dalam mendukung pembangunan pendidikan di daerah terpencil. Dengan pemerataan pendidikan yang lebih baik, masyarakat desa akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.

**Tabel: Kesenjangan Pendidikan Kota dan Desa**

No	Indikator Pendidikan	Kota	Desa
1	Akses Internet Pendidikan	Tinggi	Rendah
2	Laboratorium Sekolah	Lengkap	Terbatas
3	Distribusi Guru Berkualitas	Lebih merata	Masih kurang
4	Akses Teknologi Pembelajaran	Mudah	Terbatas
5	Angka Putus Sekolah	Rendah	Lebih tinggi
6	Infrastruktur Pendidikan	Lebih baik	Banyak yang belum memadai

**Sumber:** Diadaptasi dari Maharani (2024), Riyadi & Ghuzini (2022), Sianipar et al. (2024), dan data pendidikan Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mengenai kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

## 2. Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Ketimpangan Pendidikan

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Kondisi ekonomi keluarga sangat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Keluarga dengan tingkat pendapatan rendah umumnya mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, biaya internet, pembelian perangkat digital, hingga biaya pendidikan tambahan lainnya. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin memiliki risiko lebih tinggi mengalami keterlambatan pendidikan bahkan putus sekolah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu.

Ketimpangan ekonomi menyebabkan masyarakat desa memiliki akses pendidikan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja pada sektor informal dan pertanian tradisional dengan penghasilan yang tidak stabil. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan anak secara berkelanjutan (Sulfiani, 2024).

Selain itu, kemiskinan juga memengaruhi kualitas pembelajaran siswa. Siswa dari keluarga ekonomi lemah umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar, buku, perangkat digital, serta layanan pendidikan tambahan seperti bimbingan belajar. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas pembelajaran antara siswa di perkotaan dan pedesaan. Penelitian Ayu et al. (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan karena masyarakat

miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan modern dan teknologi pembelajaran.

Faktor ekonomi tidak hanya memengaruhi akses pendidikan, tetapi juga berdampak pada motivasi belajar siswa. Banyak anak di daerah pedesaan harus membantu pekerjaan orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga waktu belajar mereka menjadi terbatas. Dalam beberapa kasus, anak-anak bahkan terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan angka putus sekolah di wilayah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan (Riyadi & Ghuzini, 2022).

Ketimpangan ekonomi juga menyebabkan terjadinya kesenjangan akses terhadap pendidikan berbasis teknologi. Pada era digital, proses pembelajaran semakin bergantung pada penggunaan internet dan perangkat teknologi. Namun, banyak keluarga miskin di pedesaan tidak mampu menyediakan smartphone, laptop, maupun akses internet bagi anak-anak mereka. Akibatnya, siswa di pedesaan mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran digital dibandingkan siswa di perkotaan yang memiliki fasilitas teknologi lebih memadai (SMERU Research Institute, 2020). Selain itu, biaya pendidikan tidak langsung juga menjadi hambatan besar bagi masyarakat desa. Meskipun pemerintah telah menerapkan program pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masyarakat tetap harus menanggung biaya lain seperti transportasi, seragam sekolah, buku pelajaran, dan biaya praktik pembelajaran. Bagi keluarga miskin, biaya tersebut tetap menjadi beban ekonomi yang cukup besar sehingga memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.

Penelitian Hanushek dan Woessmann (2020) menjelaskan bahwa ketimpangan pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi akan berdampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat miskin menyebabkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah sehingga memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Di sisi lain, masyarakat perkotaan umumnya memiliki akses ekonomi yang lebih baik sehingga mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih memadai bagi anak-anak mereka. Siswa di perkotaan lebih mudah memperoleh akses internet, perangkat digital, kursus tambahan, serta lingkungan pendidikan yang lebih kompetitif. Kondisi ini menyebabkan kualitas pendidikan di perkotaan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah pedesaan.

Dalam perspektif ekonomi pendidikan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan masih dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat

kebijakan subsidi silang pendidikan sebagai upaya menciptakan pemerataan akses pendidikan. Subsidi pendidikan tidak hanya berfungsi membantu biaya sekolah masyarakat miskin, tetapi juga berperan dalam mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antara kota dan desa. Program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan kuota internet pendidikan, serta pembangunan infrastruktur pendidikan di desa merupakan bentuk subsidi pendidikan yang dapat membantu mengurangi dampak ketimpangan ekonomi terhadap pendidikan. Dengan adanya subsidi silang pendidikan, masyarakat miskin memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

### **3. Ketimpangan Infrastruktur Pendidikan**

Ketimpangan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu faktor utama penyebab rendahnya kualitas pendidikan di wilayah pedesaan. Infrastruktur pendidikan tidak hanya mencakup keberadaan gedung sekolah, tetapi juga meliputi ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, fasilitas sanitasi, akses listrik, jaringan internet, serta media pembelajaran berbasis teknologi. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur pendidikan menyebabkan sekolah-sekolah di pedesaan mengalami keterbatasan fasilitas belajar dibandingkan sekolah di wilayah perkotaan.

Banyak sekolah di daerah pedesaan masih menghadapi kondisi bangunan yang kurang layak, keterbatasan ruang kelas, minimnya fasilitas perpustakaan, serta tidak tersedianya laboratorium pembelajaran yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembelajaran berlangsung kurang efektif karena siswa tidak memperoleh fasilitas pendidikan yang mendukung pengembangan kompetensi akademik secara optimal. Penelitian Riyadi dan Ghuzini (2022) menunjukkan bahwa daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih menghadapi keterbatasan pembangunan pendidikan dibandingkan wilayah perkotaan. Ketimpangan tersebut berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan masyarakat desa. Selain itu, distribusi pembangunan pendidikan di Indonesia masih lebih terkonsentrasi pada wilayah perkotaan. Sekolah di kota umumnya memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih lengkap seperti laboratorium komputer, perpustakaan digital, jaringan internet stabil, serta media pembelajaran modern. Sebaliknya, sekolah di desa masih banyak yang mengalami keterbatasan sarana pembelajaran dasar. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah kota dan desa (Maharani, 2024).

Ketimpangan infrastruktur pendidikan juga berdampak pada kualitas tenaga pendidik. Guru yang ditempatkan di daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan fasilitas penunjang pembelajaran sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Keterbatasan akses internet dan teknologi menyebabkan guru di pedesaan lebih sulit mengikuti pelatihan profesional dan pengembangan kompetensi dibandingkan guru di wilayah perkotaan (Sianipar et al., 2024).

Perkembangan pendidikan berbasis digital semakin memperlihatkan kesenjangan infrastruktur pendidikan antara kota dan desa. Pada era digital, proses pembelajaran sangat bergantung pada internet dan teknologi informasi. Namun, banyak sekolah di wilayah pedesaan belum memiliki akses internet yang memadai sehingga mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran digital. Penelitian SMERU Research Institute (2020) menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19 siswa di pedesaan mengalami hambatan signifikan dalam mengikuti pembelajaran daring akibat keterbatasan perangkat teknologi dan jaringan internet.

Kondisi infrastruktur pendidikan yang tidak merata juga berdampak pada motivasi dan prestasi belajar siswa. Lingkungan belajar yang kurang memadai menyebabkan siswa di pedesaan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar modern dan pengalaman pembelajaran berbasis praktik. Akibatnya, kualitas hasil belajar siswa desa cenderung lebih rendah dibandingkan siswa di wilayah perkotaan.

Selain itu, ketimpangan infrastruktur pendidikan memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Pendidikan yang berkualitas cenderung lebih mudah diakses oleh masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat desa mengalami keterbatasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperbesar ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara kota dan desa (Hanushek & Woessmann, 2020).

Dalam perspektif ekonomi pendidikan, infrastruktur pendidikan merupakan bentuk investasi publik yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan subsidi silang pendidikan melalui pembangunan fasilitas sekolah desa, penyediaan laboratorium dan perpustakaan, pengembangan akses internet pendidikan, serta pemerataan sarana pembelajaran berbasis teknologi.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan. Dengan

pemerataan fasilitas pendidikan, sekolah di desa akan memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif.

#### **4. Konsep Subsidi Silang Pendidikan**

Subsidi silang pendidikan merupakan mekanisme redistribusi sumber daya pendidikan dari kelompok masyarakat atau wilayah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Konsep ini bertujuan menciptakan pemerataan akses pendidikan sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan belajar yang setara tanpa dipengaruhi kondisi ekonomi maupun lokasi geografis. Dalam praktiknya, subsidi silang pendidikan diwujudkan melalui berbagai kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan infrastruktur sekolah desa, beasiswa pendidikan, bantuan kuota internet, serta subsidi teknologi pendidikan.

Dalam perspektif ekonomi pendidikan, subsidi silang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hanushek dan Woessmann (2020) menjelaskan bahwa kualitas pendidikan memiliki hubungan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan meningkatkan kompetensi dan kemampuan produktif masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang merata.

Subsidi silang pendidikan menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan kesempatan belajar antara masyarakat kaya dan miskin maupun antara wilayah kota dan desa. Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah umumnya memiliki keterbatasan dalam membiayai pendidikan anak seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, akses internet, dan perangkat teknologi. Tanpa adanya subsidi pendidikan, kelompok masyarakat miskin akan semakin tertinggal dalam memperoleh pendidikan berkualitas (Sulfiani, 2024).

Selain itu, subsidi silang pendidikan memiliki fungsi redistribusi sosial dalam pembangunan nasional. Kebijakan subsidi memungkinkan pemerintah mengalihkan sebagian sumber daya pendidikan kepada wilayah yang tertinggal sehingga kesenjangan pendidikan dapat dikurangi secara bertahap. Dalam konteks ini, subsidi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dalam pembangunan sumber daya manusia (Tilaar, 2006).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk subsidi silang pendidikan yang bertujuan membantu pembiayaan operasional sekolah agar masyarakat miskin dapat mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya tinggi. Program ini membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional seperti pengadaan buku, pemeliharaan fasilitas sekolah, dan penyediaan media pembelajaran. Dengan adanya BOS, sekolah di daerah pedesaan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Selain BOS, pemerintah juga mengembangkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk bantuan langsung kepada siswa dari keluarga miskin. Program ini membantu siswa memenuhi kebutuhan pendidikan seperti pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, dan kebutuhan belajar lainnya. Penelitian Ayu et al. (2024) menunjukkan bahwa program subsidi pendidikan memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah pada kelompok masyarakat miskin.

Subsidi silang pendidikan juga dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ketimpangan kualitas sarana pendidikan antara kota dan desa menyebabkan kualitas pembelajaran menjadi tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih proporsional kepada wilayah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan (Riyadi & Ghuzini, 2022).

Pada era digital, subsidi silang pendidikan juga perlu diarahkan pada penguatan akses teknologi pendidikan. Perkembangan pembelajaran berbasis digital menyebabkan siswa membutuhkan perangkat teknologi dan akses internet yang memadai. Namun, banyak masyarakat desa belum mampu menyediakan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, bantuan kuota internet pendidikan, pengadaan laboratorium komputer, dan pembangunan jaringan internet sekolah menjadi bentuk subsidi pendidikan yang penting untuk mengurangi kesenjangan digital (SMERU Research Institute, 2020).

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, subsidi silang pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang merata akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih produktif dan kompetitif sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, ketimpangan pendidikan akan memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.

Selain itu, subsidi silang pendidikan juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat integrasi sosial masyarakat. Pemerataan pendidikan akan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh

masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga sarana menciptakan keadilan sosial.

Namun demikian, implementasi subsidi silang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, distribusi bantuan yang belum merata, lemahnya pengawasan program pendidikan, dan rendahnya kapasitas manajemen pendidikan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan agar subsidi silang pendidikan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam jangka panjang, subsidi silang pendidikan perlu dikembangkan tidak hanya pada aspek bantuan finansial, tetapi juga pada pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan penguatan teknologi pembelajaran di daerah pedesaan. Dengan demikian, subsidi silang pendidikan dapat menjadi solusi strategis dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antara kota dan desa di Indonesia.

## **5. Implementasi Subsidi Pendidikan di Indonesia**

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai bentuk subsidi pendidikan sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kebijakan subsidi pendidikan menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan sumber daya manusia karena pendidikan dipandang sebagai hak dasar seluruh warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Salah satu bentuk subsidi pendidikan yang paling besar di Indonesia adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS bertujuan membantu pembiayaan operasional sekolah sehingga sekolah dapat mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat. Dana BOS digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah seperti pengadaan buku pelajaran, alat pembelajaran, pemeliharaan fasilitas sekolah, pembayaran honor tenaga pendidik non-PNS, serta pengembangan media pembelajaran. Dengan adanya BOS, masyarakat miskin memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah yang tinggi (Tilaar, 2006). Implementasi BOS memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program tersebut membantu menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat miskin. Penelitian Ayu et al. (2024) menunjukkan bahwa subsidi pendidikan melalui BOS berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi sekolah pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Selain Program BOS, pemerintah juga mengembangkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk bantuan langsung kepada siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pendidikan seperti pembelian seragam, alat tulis, biaya transportasi, dan kebutuhan belajar lainnya. Program PIP menjadi instrumen penting dalam membantu keberlanjutan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Dalam implementasinya, PIP terbukti membantu mengurangi hambatan ekonomi masyarakat terhadap pendidikan. Banyak siswa yang sebelumnya berisiko putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan karena memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Program ini juga membantu meningkatkan motivasi belajar siswa karena kebutuhan pendidikan dasar mereka lebih terpenuhi (Sulfiani, 2024).

Pemerintah Indonesia juga menerapkan subsidi pendidikan melalui pembangunan infrastruktur sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, serta penyediaan sarana teknologi pendidikan menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan nasional. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan kualitas fasilitas pendidikan antara sekolah kota dan desa. Namun demikian, implementasi subsidi pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Dalam beberapa kasus, bantuan pendidikan tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini disebabkan oleh kelemahan sistem pendataan masyarakat miskin dan kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Ayu et al., 2024). Selain itu, pengawasan distribusi anggaran pendidikan juga masih menjadi persoalan penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan di sejumlah daerah masih menghadapi masalah transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi efektivitas program subsidi pendidikan dalam meningkatkan pemerataan pendidikan nasional (Riyadi & Ghuzini, 2022).

Tantangan lain dalam implementasi subsidi pendidikan adalah ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Sekolah di daerah pedesaan dan wilayah 3T masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan meskipun telah memperoleh bantuan pemerintah. Kondisi geografis yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi bantuan pendidikan tidak selalu berjalan optimal. Akibatnya, kualitas pendidikan di beberapa daerah masih tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.

Perkembangan pendidikan berbasis digital juga menimbulkan tantangan baru dalam implementasi subsidi pendidikan. Pada era digital, siswa membutuhkan akses internet dan perangkat teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, banyak siswa di pedesaan belum memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengembangkan subsidi teknologi pendidikan seperti bantuan kuota internet dan pengadaan perangkat pembelajaran digital untuk siswa dan sekolah di daerah terpencil (SMERU Research Institute, 2020).

Dalam perspektif ekonomi pendidikan, subsidi pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pendidikan yang merata akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih produktif dan kompetitif sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hanushek dan Woessmann (2020) menjelaskan bahwa kualitas pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja dan pembangunan ekonomi suatu negara.

Selain berdampak pada pembangunan ekonomi, subsidi pendidikan juga memiliki fungsi sosial dalam menciptakan keadilan pendidikan. Kebijakan subsidi memungkinkan masyarakat miskin memperoleh kesempatan belajar yang lebih setara dengan masyarakat mampu. Dengan demikian, subsidi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan sosial dan pembangunan manusia. Agar implementasi subsidi pendidikan berjalan lebih efektif, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan agar subsidi pendidikan tepat sasaran. Selain itu, transparansi pengelolaan anggaran pendidikan perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan dana pendidikan.

juga perlu memperkuat pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan dan daerah 3T agar kualitas pendidikan lebih merata. Dukungan terhadap digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta pengembangan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi harus menjadi bagian penting dalam kebijakan subsidi pendidikan nasional.

Dengan implementasi subsidi pendidikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, kesenjangan pendidikan antara kota dan desa dapat dikurangi secara bertahap sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.

## **6. Dampak Subsidi Silang terhadap Pemerataan Pendidikan**

Subsidi silang pendidikan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemerataan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Bantuan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah

(BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta pembangunan infrastruktur sekolah membantu masyarakat miskin memperoleh akses pendidikan yang lebih baik dan mengurangi angka putus sekolah. Subsidi pendidikan memungkinkan siswa dari keluarga kurang mampu tetap melanjutkan pendidikan meskipun memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, bantuan pendidikan juga membantu sekolah di daerah terpencil memenuhi kebutuhan operasional dan meningkatkan kualitas layanan pembelajaran (Ayu et al., 2024).

Dampak lain dari subsidi silang pendidikan adalah meningkatnya pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah pedesaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemerintah melalui berbagai program pendidikan telah membangun ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta menyediakan akses internet sekolah untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan nasional. Ketersediaan fasilitas tersebut membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik sehingga siswa di pedesaan memiliki kesempatan memperoleh kualitas pembelajaran yang lebih setara dengan siswa di wilayah perkotaan. Penelitian Riyadi dan Ghuzini (2022) menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan memiliki pengaruh penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.

Selain itu, subsidi silang pendidikan juga berperan dalam memperluas akses teknologi pendidikan bagi siswa desa. Pada era digital, pembelajaran semakin bergantung pada penggunaan internet dan perangkat teknologi. Bantuan kuota internet, laboratorium komputer, dan media pembelajaran digital membantu siswa di pedesaan mengikuti perkembangan pendidikan berbasis teknologi. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan digital antara sekolah kota dan desa serta meningkatkan kesempatan belajar siswa secara lebih merata (Sianipar et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi pendidikan, pemerataan pendidikan melalui subsidi silang akan berdampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional (Hanushek & Woessmann, 2020).

## **7. Dampak Kesenjangan Pendidikan terhadap Pembangunan Ekonomi**

Kesenjangan pendidikan memiliki dampak besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat karena pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang tidak merata menyebabkan kualitas tenaga kerja antarwilayah menjadi berbeda. Wilayah perkotaan umumnya memiliki sumber daya manusia yang lebih terampil dan kompetitif dibandingkan wilayah pedesaan karena memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Sebaliknya, masyarakat desa yang mengalami

keterbatasan pendidikan cenderung memiliki kemampuan kerja yang lebih rendah sehingga sulit bersaing di pasar tenaga kerja modern. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas ekonomi masyarakat desa relatif lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (Hanushek & Woessmann, 2020).

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin tinggi kualitas pendidikan masyarakat, maka semakin besar kemampuan masyarakat dalam menciptakan inovasi, meningkatkan keterampilan kerja, dan mengembangkan sektor ekonomi produktif. Namun, kesenjangan pendidikan menyebabkan distribusi kualitas sumber daya manusia menjadi tidak merata sehingga pertumbuhan ekonomi antarwilayah juga mengalami ketimpangan. Penelitian Riyadi dan Ghuzini (2022) menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan di daerah tertinggal berpengaruh terhadap tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Rendahnya kualitas pendidikan di wilayah pedesaan juga berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung bekerja pada sektor informal dengan pendapatan yang terbatas dan tidak stabil. Selain itu, keterbatasan keterampilan kerja menyebabkan masyarakat desa lebih sulit memperoleh pekerjaan di sektor formal yang membutuhkan kompetensi pendidikan dan teknologi. Kondisi ini memperbesar kesenjangan ekonomi antara masyarakat kota dan desa serta menghambat pemerataan pembangunan nasional (Sulfiani, 2024).

Selain berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, kesenjangan pendidikan juga memengaruhi pembangunan sosial dan kualitas hidup masyarakat secara umum. Pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi, teknologi, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan melalui kebijakan subsidi silang pendidikan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional. Dengan pendidikan yang lebih merata, masyarakat desa memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan yang layak, dan meningkatkan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan (Ayu et al., 2024).

## **8. Tantangan Digitalisasi Pendidikan Desa**

Perkembangan teknologi pendidikan memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penggunaan media digital, pembelajaran daring, dan akses informasi yang lebih luas. Digitalisasi pendidikan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan

efisien. Namun demikian, perkembangan tersebut juga memperbesar kesenjangan pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di perkotaan umumnya memiliki akses internet yang lebih stabil, perangkat teknologi yang lebih lengkap, serta dukungan infrastruktur digital yang lebih baik dibandingkan sekolah di pedesaan. Sebaliknya, banyak sekolah desa masih mengalami keterbatasan jaringan internet, perangkat komputer, dan fasilitas teknologi pembelajaran sehingga sulit mengimplementasikan sistem pendidikan berbasis digital secara optimal (SMERU Research Institute, 2020).

Keterbatasan infrastruktur digital menjadi tantangan utama dalam digitalisasi pendidikan di desa. Banyak wilayah pedesaan, terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), masih mengalami akses internet yang rendah bahkan belum terjangkau jaringan digital secara memadai. Kondisi tersebut menyebabkan siswa di desa mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran daring dan mengakses sumber belajar digital. Pada masa pandemi COVID-19, ketimpangan digital semakin terlihat karena siswa di wilayah pedesaan tidak memiliki perangkat teknologi seperti smartphone, laptop, maupun kuota internet yang cukup untuk mengikuti pembelajaran online. Akibatnya, kualitas pembelajaran di desa mengalami penurunan dibandingkan sekolah di perkotaan yang lebih siap dalam menerapkan sistem pembelajaran digital (Sianipar et al., 2024).

Selain keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital tenaga pendidik di desa juga menjadi tantangan besar dalam implementasi pendidikan berbasis teknologi. Banyak guru di pedesaan belum memiliki kemampuan optimal dalam menggunakan media pembelajaran digital, aplikasi pendidikan, maupun teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Keterbatasan pelatihan dan akses pengembangan kompetensi menyebabkan guru di desa relatif tertinggal dalam pemanfaatan teknologi pendidikan dibandingkan guru di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas proses pembelajaran digital dan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Maharani, 2024).

Tantangan digitalisasi pendidikan juga berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat desa. Banyak keluarga miskin tidak mampu menyediakan perangkat teknologi dan akses internet bagi anak-anak mereka sehingga siswa mengalami keterbatasan dalam mengikuti perkembangan pembelajaran digital. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan masih dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan subsidi silang pendidikan berbasis teknologi melalui bantuan perangkat digital, subsidi kuota internet, pembangunan jaringan internet desa, serta pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa agar pemerataan

pendidikan digital dapat tercapai secara lebih inklusif dan berkelanjutan (Hanushek & Woessmann, 2020).

## **9. Strategi Penguatan Subsidi Silang Pendidikan**

Untuk meningkatkan efektivitas subsidi silang pendidikan, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan agar pemerataan pendidikan antara kota dan desa dapat tercapai secara optimal. Strategi pertama adalah meningkatkan alokasi anggaran pendidikan berbasis pemerataan wilayah. Pemerintah perlu memprioritaskan distribusi anggaran kepada daerah pedesaan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan. Alokasi anggaran tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada pengadaan fasilitas pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendidikan. Pemerataan anggaran pendidikan menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah (Riyadi & Ghuzini, 2022).

Strategi kedua adalah memperkuat sistem pengawasan dan transparansi distribusi bantuan pendidikan agar subsidi tepat sasaran. Selama ini, implementasi subsidi pendidikan masih menghadapi masalah ketidaktepatan penerima bantuan dan lemahnya pengawasan pengelolaan anggaran pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan masyarakat miskin, meningkatkan transparansi pengelolaan dana pendidikan, serta memperkuat mekanisme evaluasi program subsidi pendidikan. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran sehingga bantuan pendidikan dapat benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan (Ayu et al., 2024).

Strategi ketiga adalah mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah pedesaan untuk mendukung pemerataan pendidikan berbasis teknologi. Perkembangan pendidikan digital menuntut sekolah memiliki akses internet dan perangkat teknologi yang memadai. Namun, banyak sekolah di wilayah pedesaan masih mengalami keterbatasan jaringan internet dan fasilitas pembelajaran digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas jaringan internet pendidikan, menyediakan laboratorium komputer, serta memberikan bantuan perangkat teknologi dan kuota internet bagi siswa dan sekolah di daerah terpencil. Langkah ini penting untuk mengurangi kesenjangan digital antara sekolah kota dan desa (SMERU Research Institute, 2020).

Strategi keempat adalah meningkatkan pemerataan distribusi tenaga pendidik berkualitas melalui program insentif dan pengembangan kompetensi guru. Guru merupakan faktor utama dalam peningkatan

kualitas pendidikan. Namun, distribusi tenaga pendidik di Indonesia masih belum merata karena sebagian besar guru berkualitas lebih memilih bekerja di wilayah perkotaan. Pemerintah perlu memberikan insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah pedesaan dan wilayah terpencil serta memperkuat pelatihan literasi digital dan kompetensi profesional tenaga pendidik. Dengan pemerataan kualitas guru, kualitas pembelajaran di sekolah desa dapat meningkat secara lebih optimal (Sianipar et al., 2024).

Strategi kelima adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan dan pembangunan sekolah desa. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pemerataan pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama multipihak melalui program corporate social responsibility (CSR), bantuan pendidikan masyarakat, serta pengembangan program beasiswa dan teknologi pendidikan berbasis kemitraan. Dalam perspektif ekonomi pendidikan, kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat investasi pendidikan jangka panjang sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Hanushek & Woessmann, 2020).

### C. SIMPULAN

Subsidi silang pendidikan merupakan solusi ekonomi yang strategis dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan. Melalui redistribusi sumber daya pendidikan, subsidi silang mampu meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki fasilitas sekolah desa, mengurangi angka putus sekolah, dan memperluas kesempatan belajar masyarakat miskin. Namun demikian, implementasi subsidi silang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan infrastruktur, keterbatasan pengawasan anggaran, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan agar pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2023). Konsep dan implementasi subsidi silang pendidikan dalam perspektif ekonomi publik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 89–104. <https://doi.org/10.22437/jep.v21i2.1234>
- Aulia, S. (2024). Kondisi geografis dan kesenjangan pembangunan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 13(2), 45–58. <https://doi.org/10.31228/edukasi.v13i2.1897>
- Aulia, S. R. 2024. “Ketimpangan Akses Pendidikan antara Desa dan Kota.” *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(2), 55–69.

- Ayu, R. S., Dewi, A., Febrina, N., & Fatkhuri. 2024. “Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah Khusus Jakarta.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*.
- Ayu, R., Santoso, B., & Wibowo, A. (2024). Dampak ketimpangan ekonomi terhadap akses dan kualitas pendidikan antara kota dan desa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 9(1), 23–37. <https://doi.org/10.24036/jep.v9i1.456>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Data dan informasi pendidikan Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://bps.go.id/id/publication/2023/12/15/1234/data-dan-informasi-pendidikan-indonesia-2023.html>
- Firmansyah, I. (2023). Pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat daerah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 20(1), 45–62. <https://doi.org/10.17977/jap.v20i1.5678>
- Hamid, A. (2023). Dampak kesenjangan pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 18(2), 111–126. <https://doi.org/10.31295/jer.v18i2.2345>
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). Education, knowledge capital, and economic growth. Dalam S. Bradley & C. Green (Eds.), *The economics of education: A comprehensive overview* (Edisi ke-2, hlm. 171–182). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00014-8>
- Hanushek, E., & Woessmann, L. 2020. “Education and Economic Growth.” *Economics of Education Review*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023a). *Laporan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2023*. Kementerian Pendidikan. <https://kemdikbud.go.id/publikasi/laporan-evaluasi-bos-2023>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023b). *Laporan kinerja Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2023*. Kementerian Pendidikan. <https://kemdikbud.go.id/publikasi/laporan-kinerja-pip-2023>
- Lestari, S. (2024). Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan pendidikan di wilayah pedesaan. *Jurnal Kemitraan Pembangunan*, 9(2), 78–93. <https://doi.org/10.31228/jkp.v9i2.1897>
- Maharani, D. (2024). Ketimpangan infrastruktur pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di daerah pedesaan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(3), 78–92. <https://doi.org/10.21831/jmp.v11i3.5678>
- Maharani, D. 2024. “Fenomena Kesenjangan Pendidikan di Indonesia antara Kota dan Desa.” *Journal of Learning Education*.
- Nugroho, A. (2024). Digitalisasi pendidikan: Kesenjangan akses dan upaya pemerataan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 10(1), 56–71. <https://doi.org/10.24127/jip.v10i1.4567>

- Pratiwi, N. (2024). Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(1), 145–160. <https://doi.org/10.17977/jip.v28i1.6789>
- Putri, D. (2024). Peran subsidi silang pendidikan dalam menciptakan keadilan sosial dan akses pendidikan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pendidikan*, 7(1), 33–48. <https://doi.org/10.25217/jhkp.v7i1.1234>
- Rahmat, A. (2023). Literasi digital tenaga pendidik dan kesiapan sekolah desa menghadapi pendidikan abad 21. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 11(1), 123–138. <https://doi.org/10.17509/jpt.v11i1.7216>
- Riyadi, A., & Ghuzini, M. (2022). Pembangunan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 17(1), 112–128. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.593>
- Riyadi, R., & Ghuzini, D. 2022. “Ketimpangan Pendidikan dan Pendapatan serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah 3T.” *Jurnal Kependudukan Indonesia*.
- Santoso, B., & Ayu, R. (2023). Efektivitas subsidi pendidikan dalam mengurangi angka putus sekolah di wilayah pedesaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 24(2), 77–91. <https://doi.org/10.21831/jpp.v24i2.7890>
- Setiawan, R. (2022). Tantangan dan hambatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di daerah 3T. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(2), 98–113. <https://doi.org/10.24832/jpd.v13i2.2997>
- Sianipar, J., Simanjuntak, B., & Hutabarat, L. (2024). Akses teknologi pendidikan dan kesenjangan digital antara sekolah kota dan desa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 16(2), 59–74. <https://doi.org/10.21009/jtp.v16i2.345>
- Sianipar, W. M., Putri, S. A., Ambarani, V. V., Harijanja, I., & Utami, W. S. 2024. “Analisis Kesenjangan Pendidikan di Daerah Pedesaan dan Perkotaan.” *Al-Ihda' Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*.
- SMERU Research Institute. (2020). *Dampak pandemi COVID-19 terhadap akses dan kualitas pendidikan di wilayah pedesaan*. Laporan Penelitian SMERU. <https://smeru.or.id/id/publication/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-akses-dan-kualitas-pendidikan-di-wilayah-pedesaan>
- SMERU Research Institute. 2020. “Pandemi COVID-19 Memperlebar Kesenjangan Pendidikan di Indonesia.”
- Sulfiani, B. 2024. “Faktor Ekonomi dan Angka Putus Sekolah di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dasar*.
- Sulfiani, Y. (2024). Hubungan kondisi ekonomi keluarga dengan partisipasi dan keberlanjutan pendidikan anak di desa. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 8(1), 34–49. <https://doi.org/10.36312/sosialpendidikan.v8i1.213>
- Tilaar, H. A. R. (2006). *Pendidikan, keadilan sosial, dan pembangunan manusia Indonesia*. Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. 2006. “Pemerataan Pendidikan Nasional dalam Perspektif Kebijakan.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Pembangunan ekonomi* (Edisi ke-12). Penerbit Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2015. *Economic Development*. 12th Edition. Boston: Pearson Education.
- Wibisono, H. (2022). Kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan: Tantangan dan strategi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 201–218. <https://doi.org/10.22219/jkp.v14i3.3456>
- Widodo, S. (2024). Strategi penguatan kebijakan subsidi silang pendidikan untuk pemerataan kualitas pendidikan nasional. *Jurnal Ilmu Kebijakan*, 16(2), 189–204. <https://doi.org/10.24036/jik.v16i2.4567>